

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

1043.FAF.U15. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Kementrian Negara/Lembaga	:	Badan Pemeriksa Keuangan RI
Unit Eselon I / II	:	Auditorat Keuangan Negara V / BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Program	:	CI. Program Pemeriksaan Keuangan Negara
Sasaran Program	:	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif
Indikator Kinerja Program	:	01 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 02 Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi
Kegiatan	:	1043. Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Pemeriksaan yang bermutu tinggi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	01. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan Yang Memenuhi Harapan Pemugasan 02. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja Dalam Pemeriksaan Tematik Nasional 03. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan 04. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
Klasifikasi Rincian Output	:	FAF (Pemeriksaan Keuangan Negara)
Indikator KRO	:	Hasil Evaluasi AKIP
Rincian Output	:	1043.FAF.U15. LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Volume dan Satuan RO	:	26 LHP

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi/Rincian Output
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
 - d. Panduan Perencanaan Penganggaran BPK Tahun Anggaran 2024.
 - e. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK Tahun 2023;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan menjelaskan bahwa pemeriksaan secara garis besar dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu (1) Perencanaan Pemeriksaan; (2) Pelaksanaan Pemeriksaan; dan (3) Pelaporan Pemeriksaan. Dalam hal terjadi kondisi

khusus, dapat dilaksanakan Pemeriksaan Interim atau Pemeriksaan Pendahuluan pada tahap perencanaan. Pemeriksaan Interim dilakukan untuk jenis Pemeriksaan Keuangan, sedangkan Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk jenis Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan DTT

Rangkaian tahapan pemeriksaan tersebut menghasilkan keluaran berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dalam struktur anggaran LHP menjadi Rincian Output (RO) LHP AKN atau LHP BPK Perwakilan tergantung satker pemeriksaannya. Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan merupakan komponen-komponen untuk mencapai RO LHP AKN atau RO LHP BPK Perwakilan. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- a. 052-Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan;
- b. 053-Melaksanakan Pemeriksaan; dan
- c. 054-Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK dhi. Satker Pemeriksaan, menentukan objek pemeriksaan berdasarkan ketentuan serta kebijakan strategis pimpinan. Selain menentukan objek pemeriksaan, Satker Pemeriksaan juga menentukan kategori profil risiko entitas/objek pemeriksaan. Profil risiko tersebut berpengaruh terhadap metode pemeriksaan, jumlah personel dan jumlah hari pemeriksaan yang akan berdampak pada besaran anggaran pemeriksaan. Secara rinci, tabel berikut menjelaskan objek pemeriksaan pada tiap jenis pemeriksaaan untuk pemeriksaan beserta kategori profil risiko entitasnya.

No	Objek Pemeriksaan	Kategori Pemeriksaan
A.	Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan	
1	Pemeriksaan LKPD PemProv Lampung	Tinggi
2	Pemeriksaan LKPD PemKot Bandar Lampung	Tinggi
3	Pemeriksaan LKPD PemKot Metro	Sedang
4	Pemeriksaan LKPD Pemkab Lampung Utara	Tinggi
5	Pemeriksaan LKPD Pemkab Way Kanan	Sedang
6	Pemeriksaan LKPD Pemkab Tulang Bawang	Sedang
7	Pemeriksaan LKPD Pemkab Lampung Selatan	Sedang
8	Pemeriksaan LKPD Pemkab Tanggamus	Sedang
9	Pemeriksaan LKPD Pemkab Pesawaran	Sedang
10	Pemeriksaan LKPD Pemkab Lampung Tengah	Sedang
11	Pemeriksaan LKPD Pemkab Lampung Timur	Sedang
12	Pemeriksaan LKPD Pemkab Tulang Bawang Barat	Sedang
13	Pemeriksaan LKPD Pemkab Mesuji	Sedang
14	Pemeriksaan LKPD Pemkab Pesisir Barat	Sedang
15	Pemeriksaan LKPD Pemkab Pringsewu	Rendah
16	Pemeriksaan LKPD Pemkab Lampung Barat	Rendah
B.	Pemeriksaan Kinerja	
1	Pemeriksaan Kinerja atas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan (PN 3 PP4 KP5) Pemkab Lampung Selatan	Sedang
2	Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Penguatan Kelembagaan & Penegakan Hukum Bid. SDA & LH (PN 6 PPI KP 4) Pemerintah Provinsi Lampung	Sedang
3	Pemeriksaan Kinerja atas Pembangunan Rendah Karbon dalam Pengelolaan Limbah (PN 6 PP3 KP3) PemKot Bandar Lampung	Sedang
4	Pemeriksaan Kinerja atas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan (PN 3 PP4 KP5) Pemkab Lampung Timur	Sedang

No	Objek Pemeriksaan	Kategori Pemeriksaan
C. Pemeriksaan DTT (Non-Banparpol)		
1	Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Pemprov Lampung	Tinggi
2	Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Kota Bandar Lampung	Tinggi
3	Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Keuangan atas penyelenggaraan pemilu KPU Provinsi Lampung	Sedang
4	Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Lampung Tengah	Sedang
5	Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Way Kanan	Sedang
6	Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Lampung Utara	Sedang

Kertas kerja perhitungan / penentuan kategori pemeriksaan terlampir dalam lampiran KAK Keluaran LHP ini.

B. Penerima Manfaat

Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten Lampung

C. Strategi Pencapaian Rincian Output

1. Metode Pelaksanaan

Pencapaian RO LHP AKN/LHP BPK Perwakilan dilaksanakan melalui metode kombinasi antara swakelola dengan penyedia, dengan porsi yang lebih besar melalui swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

RO LHP AKN/BPK Perwakilan dilaksanakan melalui tahapan/komponen dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Komponen 052. Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan

Secara umum, pemeriksaan interim/pendahuluan dilakukan pada tahap perencanaan dengan Pemeriksaan Interim dilakukan pada Pemeriksaan Keuangan sedangkan Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan pada Pemeriksaan Kinerja atau DTT. Pemeriksaan Interim bertujuan memberikan kesimpulan hasil revidu atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta memperoleh data dan informasi untuk pengembangan perencanaan pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan Interim dilakukan sebelum Laporan Keuangan diserahkan oleh entitas. Sementara itu, Pemeriksaan Pendahuluan adalah pemeriksaan lapangan dalam rangka perencanaan pemeriksaan. Pada Pemeriksaan DTT, Pemeriksaan Pendahuluan bertujuan untuk memberikan penilaian atas efektivitas SPI dan penilaian risiko. Adapun pada Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Pendahuluan bertujuan untuk memperoleh pemahaman entitas, mengidentifikasi masalah, menentukan area kunci, menentukan tujuan dan lingkup pemeriksaan, menentukan kriteria pemeriksaan, dan mengidentifikasi jenis bukti serta prosedur pemeriksaan.

Dalam komponen ini, dilakukan aktivitas pemeriksaan lapangan sehingga terdapat kebutuhan perjalanan dinas. Selain itu, terdapat kebutuhan jasa konsultan/tenaga dan uji laboratorium jika diperlukan untuk mendukung pengambilan kesimpulan, serta kebutuhan dukungan pemeriksaan lainnya berupa dukungan akomodasi dan dukungan administratif.

b. Komponen 053. Melaksanakan Pemeriksaan

Komponen Melaksanakan pemeriksaan merupakan implementasi dari perencanaan pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan pemeriksaan dimulai dari komunikasi awal dan diakhiri dengan komunikasi akhir dengan pejabat entitas yang diperiksa.

Pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa sesuai pembagian tugas dalam Program Kerja Perorangan (PKP). Pelaksanaan Program Pemeriksaan ditujukan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan kompeten. Bukti pemeriksaan merupakan dokumen pendukung yang dimuat dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Selanjutnya Tim Pemeriksaan melaporkan secara berjenjang untuk memastikan terpenuhinya *Quality Control* dan *Quality Assurance* terhadap Hasil Pemeriksaan.

Dalam komponen ini, dilakukan aktivitas pemeriksaan lapangan sehingga terdapat kebutuhan perjalanan dinas. Selain itu, terdapat kebutuhan jasa konsultan/tenaga dan uji laboratorium jika diperlukan untuk mendukung pengambilan kesimpulan, serta kebutuhan dukungan pemeriksaan lainnya berupa dukungan akomodasi dan dukungan administratif.

c. Komponen 054. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan

Komponen Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan proses penyusunan laporan berdasarkan hasil analisis atas Temuan Pemeriksaan yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Proses pelaporan pemeriksaan disiapkan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa, Pejabat Struktural Pemeriksa, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.

Adapun waktu pelaksanaan Laporan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
052. Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan												
053. Melaksanakan Pemeriksaan												
054. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan												

3. Rekapitulasi Pemeriksaan Satker

No	Objek Pemeriksaan	Vol	Biaya Pemeriksaan (Rp)	Tujuan/Alasan Pemeriksaan
A.	Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan			
1	Pemeriksaan Interim LKPD PemProv Lampung	0	97.577.000	<i>Mandatory</i>
	Pemeriksaan Terinci LKPD PemProv Lampung	1	165.027.000	<i>Mandatory</i>
2	Pemeriksaan Interim LKPD PemKot Bandar Lampung	0	66.261.000	<i>Mandatory</i>
	Pemeriksaan Terinci LKPD PemKot Bandar Lampung	1	117.700.000	<i>Mandatory</i>
3	Pemeriksaan Interim LKPD PemKot Metro	0	160.995.000	<i>Mandatory</i>
	Pemeriksaan Terinci LKPD PemKot Metro	1	229.809.000	<i>Mandatory</i>
4	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Lampung Utara	0	160.437.000	<i>Mandatory</i>
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Lampung Utara	1	230.097.000	<i>Mandatory</i>

No	Objek Pemeriksaan	Vol	Biaya Pemeriksaan (Rp)	Tujuan/Alasan Pemeriksaan
5	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Way Kanan	0	160.725.000	Mandatory
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Way Kanan	1	230.385.000	Mandatory
6	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Tulang Bawang	0	160.437.000	Mandatory
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Tulang Bawang	1	230.097.000	Mandatory
7	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Lampung Selatan	0	160.293.000	Mandatory
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Lampung Selatan	1	229.809.000	Mandatory
8	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Tanggamus	0	160.245.000	Mandatory
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Tanggamus	1	229.905.000	Mandatory
9	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Pesawaran	0	160.245.000	Mandatory
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Pesawaran	1	229.521.000	Mandatory
10	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Lampung Tengah	0	160.341.000	Mandatory
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Lampung Tengah	1	230.001.000	Mandatory
11	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Lampung Timur	0	160.341.000	Mandatory
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Lampung Timur	1	230.001.000	Mandatory
12	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Tulang Bawang Barat	0	160.341.000	Mandatory
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Tulang Bawang Barat	1	230.337.000	Mandatory
13	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Mesuji	0	160.821.000	Mandatory
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Mesuji	1	230.481.000	Mandatory
14	Pemeriksaan Interim Pemkab Pesisir Barat	0	159.605.000	Mandatory
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Pesisir Barat	1	229.265.000	Mandatory
15	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Pringsewu	0	159.957.000	Mandatory
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Pringsewu	1	229.617.000	Mandatory
16	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Lampung Barat	0	161.815.000	Mandatory
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Lampung Barat	1	230.385.000	Mandatory
B.	Pemeriksaan Kinerja			
1	Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan (PN 3 PP4 KP5) Pemkab Lampung Selatan	0	166.134.000	Tujuan : menilai efektivitas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan
	Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan (PN 3 PP4 KP5) Pemkab Lampung Selatan	1	216.370.000	Tujuan : menilai efektivitas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan
2	Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Penguatan Kelembagaan & Penegakan Hukum Bid. SDA & LH (PN 6 PPI KP 4) Pemerintah Provinsi Lampung	0	85.260.000	Tematik Nasional PN 6
	Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Penguatan Kelembagaan & Penegakan Hukum Bid. SDA & LH (PN 6 PPI KP 4) Pemerintah Provinsi Lampung	1	114.826.000	Tematik Nasional PN 6
3	Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pembangunan Rendah Karbon dalam Pengelolaan Limbah (PN 6 PP3 KP3) PemKot Bandar Lampung	0	68.530.000	Tematik Nasional PN 6
	Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Pembangunan Rendah Karbon dalam Pengelolaan Limbah (PN 6 PP3 KP3) PemKot Bandar Lampung	1	98.006.000	Tematik Nasional PN 6
4	Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan (PN 3 PP4 KP5) Pemkab Lampung Timur	0	165.101.000	Tujuan : menilai efektivitas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Pemkab Lampung Timur

No	Objek Pemeriksaan	Vol	Biaya Pemeriksaan (Rp)	Tujuan/Alasan Pemeriksaan
	Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan (PN 3 PP4 KP5) Pemkab Lampung Timur	1	216.562.000	Tujuan : menilai efektivitas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Pemkab Lampung Timur
C.	Pemeriksaan DTT (Non-Banparpol)			
1	Pemeriksaan Pendahuluan DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Pemprov Lampung	0	114.701.000	Tujuan: Untuk mengetahui dan menilai serta memberikan simpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban kegiatan atas Belanja Modal Alasan :
	Pemeriksaan Terinci DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Pemprov Lampung	1	159.857.000	1. Dukungan Pemeriksaan LKPD Tahun 2024 2. Total anggaran Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp1,13 triliun
2	Pemeriksaan Pendahuluan DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Kota Bandar Lampung	0	58.440.000	Tujuan Untuk mengetahui dan menilai serta memberikan simpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban kegiatan atas Belanja Modal
	Pemeriksaan Terinci DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Kota Bandar Lampung	1	123.526.000	Alasan : 1. Dukungan Pemeriksaan LKPD Tahun 2024 2. Total anggaran Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp594,18 miliar
3	Pemeriksaan Pendahuluan DTT Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Keuangan atas penyelenggaraan pemilu pada KPU Provinsi Lampung	0	75.617.000	Tujuan: Untuk menguji dan menilai serta memberikan kesimpulan atas Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Keuangan atas penyelenggaraan pemilu pada KPU Provinsi Lampung
	Pemeriksaan Terinci DTT Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Keuangan atas penyelenggaraan pemilu pada KPU Provinsi Lampung	1	161.582.000	Alasan : Kebijakan Pengalokasina Belanja Non Operasional Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Pendahuluan DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Lampung Tengah	0	139.274.000	Tujuan: Untuk menguji dan menilai serta memberikan kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Daerah
	Pemeriksaan Terinci DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Lampung Tengah	1	242.777.000	Alasan : 1. Dukungan Pemeriksaan LKPD Tahun 2024 2. Total anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2,85 triliun
5	Pemeriksaan Pendahuluan DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Way Kanan	0	139.274.000	Tujuan: Untuk menguji dan menilai serta memberikan kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Daerah
	Pemeriksaan Terinci DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Way Kanan	1	243.161.000	Alasan : 1. Dukungan Pemeriksaan LKPD Tahun 2024 2. Total anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1,37 triliun
6	Pemeriksaan Pendahuluan DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Lampung Utara	0	139.274.000	Tujuan: Untuk menguji dan menilai serta memberikan kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Daerah
	Pemeriksaan Terinci DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Lampung Utara	1	242.873.000	Alasan : 1. Dukungan Pemeriksaan LKPD Tahun 2024 2. Total anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1,90 triliun
Total		26	8.884.018.000	

4. Alokasi Personel dan Waktu Pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan, sebagai berikut :

No	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Perhitungan Mandays									Total Mandays
			KT			KST			AT			
			Org	Hari	Mandays	Org	Hari	Mandays	Org	Hari	Mandays	
a	b	c	d	e	(f=d x e)	g	h	(i=g x h)	j	k	(l=j x k)	(m = f + i + j)
Semester I												
	Pemeriksaan Keuangan											
1	Pemeriksaan Interim LKPD PemProv Lampung	LK	1	25	25	0	0	0	5	25	125	150
	Pemeriksaan Terinci LKPD PemProv Lampung	LK	1	35	35	0	0	0	5	35	175	210
2	Pemeriksaan Interim LKPD PemKot Bandar Lampung	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD PemKot Bandar Lampung	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
3	Pemeriksaan Interim LKPD PemKot Metro	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD PemKot Metro	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
4	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Lampung Utara	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Lampung Utara	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
5	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Way Kanan	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Way Kanan	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
6	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Tulang Bawang	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Tulang Bawang	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
7	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Lampung Selatan	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Lampung Selatan	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
8	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Tanggamus	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Tanggamus	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
9	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Pesawaran	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Pesawaran	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
10	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Lampung Tengah	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Lampung Tengah	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
11	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Lampung Timur	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Lampung Timur	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
12	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Tulang Bawang Barat	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Tulang Bawang Barat	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
13	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Mesuji	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Mesuji	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
14	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Pesisir Barat	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Pesisir Barat	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150

0	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Perhitungan Mandays									Total Mandays
			KT			KST			AT			
			Org	Hari	Mandays	Org	Hari	Mandays	Org	Hari	Mandays	
1	b	c	d	e	(f=d x e)	g	h	(i=g x h)	j	k	(l=j x k)	(m = f + i + j)
5	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Pringsewu	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Pringsewu	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
6	Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Lampung Barat	LK	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci LKPD Pemkab Lampung Barat	LK	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
Semester I			32	885	885	0	0	0	130	885	3600	4485
Semester II												
Pemeriksaan Kinerja												
1	Pemeriksaan Interim Kinerja atas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Pemkab Lampung Selatan	Kinerja	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Pemkab Lampung Selatan	Kinerja	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
2	Pemeriksaan Interim Kinerja atas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Penguatan Kelembagaan & Penegakan Hukum Bid. SDA & LH (PN 6 PPI KP 4) Pemerintah Provinsi Lampung	Kinerja	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Penguatan Kelembagaan & Penegakan Hukum Bid. SDA & LH (PN 6 PPI KP 4) Pemerintah Provinsi Lampung	Kinerja	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
3	Pemeriksaan Interim Kinerja atas Pembangunan Rendah Karbon dalam Pengelolaan Limbah (PN 6 PP3 KP3) PemKot Bandar Lampung	Kinerja	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Pembangunan Rendah Karbon dalam Pengelolaan Limbah (PN 6 PP3 KP3) PemKot Bandar Lampung	Kinerja	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
4	Pemeriksaan Interim Kinerja atas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Pemkab Lampung Timur	Kinerja	1	25	25	0	0	0	4	25	100	125
	Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dalam Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Pemkab Lampung Timur	Kinerja	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
Pemeriksaan PDTT												
1	Pemeriksaan Interim DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Pemprov Lampung	PDTT	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
	Pemeriksaan Terinci DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Pemprov Lampung	PDTT	1	35	35	0	0	0	4	35	140	175
2	Pemeriksaan Interim DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Kota Bandar Lampung	PDTT	1	20	20	0	0	0	4	20	80	100
	Pemeriksaan Terinci DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Kota Bandar Lampung	PDTT	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
3	Pemeriksaan Interim DTT Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Keuangan atas penyelenggaraan pemilu KPU Provinsi	PDTT	1	19	19	0	0	0	4	20	80	99
	Pemeriksaan Terinci DTT Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Keuangan atas penyelenggaraan pemilu KPU Provinsi	PDTT	1	35	35	0	0	0	4	35	140	175

No	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Perhitungan Mandays									Total Mandays
			KT			KST			AT			
			Org	Hari	Mandays	Org	Hari	Mandays	Org	Hari	Mandays	
a	b	c	d	e	(f=d x e)	g	h	(i=g x h)	j	k	(l=j x k)	(m = f + i + j)
4	Pemeriksaan Interim DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Lampung Tengah	PDTT	1	20	20	0	0	0	4	20	80	100
	Pemeriksaan Terinci DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Lampung Tengah	PDTT	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
5	Pemeriksaan Interim DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Way Kanan	PDTT	1	20	20	0	0	0	4	20	80	100
	Pemeriksaan Terinci DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Way Kanan	PDTT	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
6	Pemeriksaan Interim DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Lampung Utara	PDTT	1	20	20	0	0	0	4	20	80	100
	Pemeriksaan Terinci DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemkab Lampung Utara	PDTT	1	30	30	0	0	0	4	30	120	150
Semester II			20	539	539	0	0	0	80	540	2160	2699
Total Semester I + II			52	1424	1424	0	0	0	210	1425	5760	7184

Jumlah Pemeriksa	Mandays Semester I	Hasil Pemeriksaan Semester I	Mandays Semester II	Hasil Pemeriksaan Semester II	Total Hari Pemerisaan
a	b	(c=b/a)	d	(e=d/a)	(f=c+e)
108	4485	42	2699	25	67

D. Identifikasi Resiko Dan Rencana Aksi Penanggannya

Rincian Output/Komponen/Sub Komponen	Identifikasi Resiko	Rencana Aksi
LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Penyerapan anggaran tidak optimal	Memperhitungkan rencana kegiatan pemeriksaan sesuai SBK

E. Biaya yang diperlukan

Untuk menghasilkan 26 LHP sebagaimana yang ditargetkan tersebut, Satker Perwakilan Provinsi Lampung memerlukan biaya sebesar Rp8.884.018.000,00 untuk RO LHP. Rincian biaya tersebut disajikan dalam RAB terlampir.

Sebagai Informasi tambahan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menganggarkan biaya paket Meeting dalam pelaksanaan RO LHP pada RKA 2024. Sesuai ketentuan dalam Standar Biaya Masukan Tahun 2024, dalam pelaksanaan realisasinya atas biaya tersebut Perwakilan Provinsi Lampung telah melibatkan pihak eksternal yaitu Pemerintah Daerah entitas yang di periksa pada pelaksanaan penyelenggaraan paket meeting. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga menganggarkan biaya wakil penanggungjawab (WPJ) dimana biaya pemeriksaan untuk WPJ telah mempertimbangkan susunan tim dengan memperhitungkan lingkup pemeriksaan, reviu berjenjang dan risiko pemeriksaan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 29 September 2023

KPA/Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Perwakilan



Yusnadewi

NIP. 197092021996032001

sy

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
RENCANA KERJA ANGGARAN T.A. 2024**

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan
 Unit Eselon I / II : Auditorat Keuangan Negara V / BPK Perwakilan Provinsi Lampung
 Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan Yang Bermutu Tinggi
 Indikator Kinerja Kegiatan : 01. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
 : 02. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
 : 03. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
 : 04. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
 Klasifikasi Rincian Output : FAF (Pemeriksaan Keuangan Negara)
 Indikator KRO : 01 Hasil Evaluasi AKIP
 Rincian Output : 1043.FAF.U15. LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung
 Volume dan Satuan RO : 26 LHP
 Alokasi Dana : Rp8.884.018.000,00

Kode	Uraian	Jenis Komponen (Utama/)	Vol 1	Sat 1	Vol 2	Sat 2	Vol 3	Sat 3	Volume	Satuan Ukur	Harga Satuan	Jumlah
1043	PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA											8.884.018.000
1043.FAF.U15	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung								26	LHP		8.884.018.000
052	Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan	Utama										3.562.041.000
A	Tanpa Sub Komponen											3.562.041.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											614.349.000
	- Pemeriksaan LKPD		16	Tim					16	Tim	24.095.875	385.534.000
	- Pemeriksaan Kinerja		4	Tim					4	Tim	23.981.250	95.925.000
	- Pemeriksaan PDDT		6	Tim					6	Tim	22.148.333	132.890.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa											2.947.692.000
	- Pemeriksaan LKPD		16	Tim					16	Tim	126.556.375	2.024.902.000
	- Pemeriksaan Kinerja		4	Tim					4	Tim	97.275.000	389.100.000
	- Pemeriksaan PDDT		6	Tim					6	Tim	88.948.333	533.690.000
053	Melaksanakan Pemeriksaan	Utama										4.917.938.000
A	Tanpa Sub Komponen											4.917.938.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											747.590.000
	- Pemeriksaan LKPD		16	Tim					16	Tim	28.501.875	456.030.000
	- Pemeriksaan Kinerja		4	Tim					4	Tim	28.045.000	112.180.000
	- Pemeriksaan DTT		6	Tim					6	Tim	29.896.667	179.380.000
522191	Belanja Jasa Lainnya											525.000.000
	- Biaya Uji Bukti Fisik Pemeriksaan LKPD		16	Paket					16	Paket	25.000.000	400.000.000
	- Biaya Uji Bukti Fisik Pemeriksaan Belanja		6	Paket					6	Paket	20.833.333	125.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa											3.645.348.000
	- Pemeriksaan LKPD		16	Tim					16	Tim	149.825.500	2.397.208.000
	- Pemeriksaan Kinerja		4	Tim					4	Tim	117.912.000	471.648.000
	- Pemeriksaan DTT		6	Tim					6	Tim	129.415.333	776.492.000
054	Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan	Utama										404.039.000
A	Tanpa Sub Komponen											404.039.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											83.018.000
	- Pemeriksaan LKPD		16	Tim					16	Tim	3.193.000	51.088.000
	- Pemeriksaan Kinerja		4	Tim					4	Tim	3.193.000	12.772.000
	- Pemeriksaan DTT		6	Tim					6	Tim	3.193.000	19.158.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota											321.021.000
	- Pemeriksaan LKPD		16	Tim					16	Tim	12.381.938	198.111.000
	- Pemeriksaan Kinerja		4	Tim					4	Tim	12.291.000	49.164.000
	- Pemeriksaan DTT		6	Tim					6	Tim	12.291.000	73.746.000

Bandar Lampung, 29 September 2023
 Kuasa Pengguna Anggaran

KEPALA PERWAKILAN
 Yusnadewi
 NIP. 197013021096032001




RENCANA UMUM PENGADAAN - SWAKELOLA

Unit Eselon II/ Satker : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Tahun Anggaran : 2024

Kode dan Nama Kegiatan :(1043) Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Kode dan Nama KRO : (FAF) Pemeriksaan Keuangan Negara

Kode dan Nama RO : (U15) LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No	Tipe Swakelola	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Volume	Satuan	Uraian Pekerjaan	Dana				Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
							Pra DIPA/ DIPA	Sumber Dana	Kode Kegiatan/KRO/RO/ Komponen/MAK	Anggaran Pengadaan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tipe 1	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	26	LHP	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Ya	DIPA	1043.FAF.U15.052.521219	614.349.000	Januari s.d Desember 2024
3	Tipe 1	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	26	LHP	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Ya	DIPA	1043.FAF.U15.052.524111	2.947.692.000	Januari s.d Desember 2024
4	Tipe 1	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	26	LHP	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Ya	DIPA	1043.FAF.U15.053.521219	747.590.000	Januari s.d Desember 2024
6	Tipe 1	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	26	LHP	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Ya	DIPA	1043.FAF.U15.053.522191	525.000.000	Januari s.d Desember 2024
7	Tipe 1	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	26	LHP	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Ya	DIPA	1043.FAF.U15.053.524111	3.645.348.000	Januari s.d Desember 2024
8	Tipe 1	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	26	LHP	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Ya	DIPA	1043.FAF.U15.054.521219	83.018.000	Januari s.d Desember 2024
9	Tipe 1	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	26	LHP	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	Ya	DIPA	1043.FAF.U15.054.524114	321.021.000	Januari s.d Desember 2024
Total										8.884.018.000	

Bandar Lampung, 29 September 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



Yusnadewi

NIP. 198012021996032001